

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan pada tahun 2001 dan undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah dalam UU No. 32 tahun 2004, menjelaskan bahwa definisi dari otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang untuk mengatur sendiri pemerintahannya. Tujuan utama dengan adanya otonomi daerah adalah untuk tercapainya *Good Government Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, dan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) adalah dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara (Mahendra, 2013). Dimana pada era otonomi daerah saat ini, transparansi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah menjadi sangat penting. Masyarakat berharap bahwa otonomi daerah menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat, serta membudayakan dan menciptakan ruang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002).

Tekanan institusional cenderung lebih berkembang di mana pengukuran dan kontrol yang lemah atau tidak tepat, yaitu di mana akuntabilitas rendah (Frumkin dan Galaskiewicz, 2004). Rendahnya akuntabilitas yang ada menggambarkan rendahnya keinginan organisasi publik dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan. Tidak adanya transparansi publik

akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas dan dapat merugikan masyarakat. Dampak negatif yang akan timbul dikarenakan tidak adanya transparansi adalah dapat menimbulkan distorsi dalam alokasi sumber daya, memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat, menyuburkan praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Pada tahun 2011, tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi, yaitu dengan CPI (*Corruption Perceptions Index*) sebesar 3,0 (dengan kisaran 0-10) (Transparency International Indonesia). Hal dapat dijadikan salah satu gambaran bahwa transparansi di Indonesia masih sangat rendah (Ridha, dan Basuki 2012), sedangkan tahun sebelumnya ditahun 2015 skor indonesia menjadi 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur, Skor Indonesia secara pelan naik 2 poin, dan naik cukup tinggi 19 peringkat dari tahun sebelumnya. Skor CPI berada pada rentang 0-100.0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih.

Terdapat tiga mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan *good governance* yaitu : Pertama, mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat. Kedua, memperbaiki *internal rules* dan mekanisme pengendalian, dan Ketiga, membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2006).

Dalam mekanisme tata kelola, pelaporan keuangan memiliki dua tujuan, yaitu organisasi yang transparan dan keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Hess, 2007). Masyarakat memiliki hak dasar untuk tahu (*basic right to know*) dan memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan atau program dilakukan (Stiglitz, 1999) serta bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya (Silver, 2005).

Tekanan Eksternal adalah tekanan yang berasal dari luar SKPD seperti peraturan (regulasi), eksekutif, masyarakat, dan sebagainya. Adanya tekanan eksternal dapat berakibat pada praktik-praktik SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang hanya bersifat formalitas untuk memperoleh legitimasi. Praktik-praktik yang dimaksud dalam penelitian ini di khususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan (Ridha, dan Basuki 2012).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh tekanan eksternal terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Ridha dan Basuki(2012), Sihaoloho (2013), dan Hastuti (2015) menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, berupa peraturan dan kebijakan yang menjadi pemicu diterapkannya transparansi pelaporan keuangan. Julita dan Belian (2015) dan Dewi *et.al.* (2015) meneliti variabel yang sama dengan hasil tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Pengendalian internal merupakan pengendalian kegiatan (operasional) perusahaan yang dilakukan pimpinan perusahaan untuk mencapai tujuan secara

efisien, yang terdiri dari kebijakan kebijakan dan prosedur prosedur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu dari operasi perusahaan. Oleh karena itu sebelum auditor melakukan audit secara mendalam atas informasi yang tercantum dalam laporan keuangan harus memahami terlebih dahulu pengendalian intern (Sari, 2012).

Pengendalian internal mempunyai tujuan untuk mendapatkan data tepat dan dapat dipercaya, melindungi harta atau aktiva perusahaan, dan meningkatkan efektivitas pegawai sehingga pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan pengendalian internal menurut Mulyadi (2002) dalam Sari (2012) adalah keandalan informasi keuangan, dimana pengendalian internal ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan harus disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi di Indonesia, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan peningkatan kegiatan operasi secara efektif dan efisien (Sari, 2012).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Sari (2012), Amelia (2015), Alim (2015), Hastuti (2015) menunjukkan bahwa pengendalian Internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Ketidakpastian lingkungan adalah kondisi dimana SKPD mengalami ketidakpastian yang dapat disebabkan adanya pengaruh dari luar SKPD, seperti sering terjadinya perubahan peraturan, tidak padunya antara peraturan yang satu dengan yang lain, terjadinya mutasi staf SKPD yang cepat, dan lain sebagainya.

SKPD dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, baik dalam praktik maupun operasionalnya. Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini dikhususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan (Ridha, dan Basuki 2012).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Ridha dan Basuki (2012), Sihaloho (2013), dan Hastuti (2015) menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Fardian (2014), Julita dan Belian (2015), dan Satyaningsih *et.al.* (2014) melaksanakan penelitian dengan variabel yang sama menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Komitmen manajemen sendiri terkait dengan profesionalisme. Perubahan komitmen dapat berdampak pada masalah karakter dan integritas organisasi (Dacin *et al.*, 2002). Paine (1994) menyatakan bahwa strategi integritas merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih menuntut daripada inisiatif kepatuhan atas hukum. Kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat. Institusionalisasi sebagai proses dalam organisasi untuk menetapkan suatu karakter ditentukan oleh komitmen organisasi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip (Selznick, 1992 dalam Dacin *et al.*, 2002). Transparansi merupakan salah satu nilai atau prinsip (PP No. 58/2005,

Penjelasan Pasal 4 ayat 1) yang harus dipegang oleh organisasi dalam pengelolaan keuangannya (Ridha dan Basuki, 2012).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh komitmen manajemen terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Ridha dan Basuki (2012), Hastuti (2015), dan Dewi *et. al.* (2015) menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian yang sama juga dilaksanakan oleh Julita dan Belian (2015) dan Purnamasari (2015) dengan variabel yang sama menunjukkan bahwa komitmen manajemen tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dalam penilaian profesionalisme (Fardian, 2014). Kompetensi Sumber Daya Manusia yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara profesional, efektif dan efisien (Keputusan Kepala BKN No 46A Tahun 2007).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Fardian (2014) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian dengan variabel yang sama dilakukan oleh Purnamasari (2015)

menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan. Menurut Ridha dan Basuki (2012), penelitian empiris di Indonesia mengenai penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah belum banyak ditemui. Peneliti termotivasi untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan transparansi pelaporan keuangan yang didorong oleh adanya tekanan eksternal, system pengendalian internal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, sumber daya manusia.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Ridha dan Basuki (2012) yang berjudul “Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.” Penelitian ini belum banyak dilaksanakan di daerah lain. Beberapa penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti lain, seperti Fardian (2014) di SKPD Pemerintah Kota Padang, dan Julita dan Belian (2015) di Pemerintah Kota Pekanbaru menunjukkan hasil yang berbeda.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, lokasi penelitian, periode penelitian, dan variabel penelitian. Lokasi yang digunakan oleh peneliti yaitu Kabupaten Tegal pada tahun 2015. Peneliti menggunakan sampel SKPD di Kabupaten Tegal karena pada lokasi tersebut merupakan pemerintah

daerah yang menerapkan transparansi pelaporan keuangan daerah. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan Dua variabel, diantaranya Pengendalian Internal dan Kompetensi sumber daya manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian latar belakang masalah di atas, maka peneliti membuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah tekanan eksternal berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan ?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan?
3. Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan?
4. Apakah komitmen manajemen berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan?
5. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh tekanan eksternal terhadap transparansi pelaporan keuangan.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi pelaporan keuangan.

3. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap transparansi pelaporan keuangan.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh komitmen manajemen terhadap transparansi pelaporan keuangan.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap transparansi pelaporan keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan di bidang sektor publik, khususnya dalam analisis faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan yang ada di pemerintah daerah dimana dapat menjadi acuan kerja serta nantinya dapat menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini menambah wawasan tentang pengukuran tingkat transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah dan faktor apa saja yang mempengaruhinya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pertanggung jawaban pemerintah akan kerja dan kinerja untuk amanah yang di berikan oleh masyarakat dalam memberikan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang nantinya

menjadi sarana informasi bagi pihak eksternal. Dan menjadi acuan pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan untuk kebijakan selanjutnya.

- b. Bagi masyarakat, penelitian sebagai sarana informasi tentang situasi dan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan amanah dan tanggung jawabnya berdasarkan transparansi baik dalam segi administrative maupun financial yang bersifat laporan keuangan yang di laporkan secara transparan.